

PERUBAHAN TATANAN SOSIAL DAN TRANSFORMASI PEMAKNAAN PANCASILA

FX.Adji Samekto¹, Ani Purwanti²

¹Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Jl. Prof Sudarto SH No.1 Kampus UNDIP Tembalang Semarang, Jawa Tengah, Indonesia.
samektoadjifx@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Jl. Prof Sudarto SH No.1 Kampus UNDIP Tembalang Semarang, Jawa Tengah, Indonesia.
ani_purwanti81@yahoo.com

Abstract

The changing in the social order as an impact of free market domination and liberal democracy are increasingly showing their influence in the political and economic order in various countries including Indonesia. Obviously, its situation should affects the implementation of ideology which must be continuously transformed to be able to answer the challenges of very significant change in the social order. Based on this background, then questions were proposed as follow; (1) what is the influence of the shift in social order to the interpretation of Pancasila; (2) how is the influence of the domination of liberal democracy on social order, especially in the transformation of Pancasila's value in order to inline with the changing social order. Analysis which based on philosophical-historical and sociological approach, provide the following conclusions: First, the success of liberal democracy penetrates space and time and is invincible at this time, must be conceived as a spirit to fight for democracy based on Pancasila to realize justice and prosperity in Indonesia which must coexist with the free market mechanism in the global era. We can still be participants in the free market, but must be concerned with the social's problem and when it have to arriving at a common decision, the interests of the underprivileged have to be take precedence. Transformation of the interpretation of Pancasila in a social change era must be able to prove that Pancasila would be able to be a means for Indonesian to realize the concrete needs of social life. An ideology must be able to overcome the challenges of life

Keywords: *Liberal Democracy; Pancasila; Torn Country.*

Abstrak

Perubahan-perubahan tatanan sosial sebagai implikasi dominasi pasar bebas dan demokrasi liberal semakin menampakkan pengaruhnya dalam tatanan politik, ekonomi di berbagai negara termasuk Indonesia, dengan dukungan teknologi telekomunikasi yang pesat di era digital sekarang ini. Hal itu tentu berpengaruh pada implementasi ideologi yang harus terus-menerus ditransformasikan untuk mampu menjawab tantangan perubahan yang sangat signifikan. Berlatarbelakang itu diajukan pertanyaan; (1) bagaimana pengaruh pergeseran tatanan sosial terhadap pemaknaan Pancasila; (2) bagaimana pengaruh dominasi demokrasi liberal terhadap tatanan sosial terutama di Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan itu perlu dijawab agar Pancasila tetap dapat diartikulasikan namun relevan dengan perkembangan tatanan sosial. Berdasarkan hasil pembahasan yang mendasarkan pada kajian dalam pendekatan filosofis-historis dan sosiologis maka diperoleh kesimpulan: Pertama, keberhasilan demokrasi liberal menembus ruang dan waktu dan tak terkalahkan pada saat ini, seharusnya dapat menjadi pelajaran bagi kita tentang bagaimana seharusnya demokrasi Pancasila dikelola untuk mengantarkan kemajuan bangsa berdampingan dengan keberlakuan pasar bebas. Kedua, kita tetap dapat menjadi partisipan dalam pasar bebas, namun harus peduli dengan

penderitaan masyarakat dan ketika harus sampai pada keputusan bersama, kepentingan masyarakat bangsa harus dikedepankan. Oleh karena itu transformasi pemaknaan Pancasila dalam era kekinian menjadi sesuatu yang tak terhindarkan. Ideologi harus dapat menjawab tantangan konkret.

Kata Kunci: Demokrasi Liberal; Pancasila; Negara yang Terkoyak.

A. Pendahuluan

Rumusan Pancasila sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 telah kembali dikukuhkan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1968 tentang tata urutan dan rumusan dalam penulisan/pembacaan dan pengucapan sila-sila Pancasila. Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga dimuat dalam Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila Dasar Negara (MPR RI, 2017). Hal ini penting untuk meneguhkan kedudukan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 walaupun status ketetapan MPR tersebut merupakan ketetapan yang tidak perlu dilakukan tindakan lebih lanjut, baik karena bersifat *einmalig* (sekali dan final), telah dicabut maupun telah selesai dilaksanakan.

Akan tetapi kini dimensi ruang dan waktunya sudah sangat berubah dari dimensi ruang dan waktu, saat Bung Karno memperkenalkan 5 (lima) prinsip dasar yang dinamainya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 (BPIP, 2020). Filsuf Yunani Aristoteles menyatakan: Perubahan adalah keniscayaan, tidak ada yang lebih abadi selain perubahan itu sendiri. Ajaran ini sangat mendasari ide-ide dasar ilmu-ilmu yang mendasarkan pengembangannya pada pendekatan induktif. Oleh karena itulah Sosiolog Emile Durkheim (1859-1917) menerangkan bahwa masyarakat selalu berkembang dari tipe “masyarakat sederhana” menuju “masyarakat yang

rasional” dengan segala implikasinya. Terminologi “masyarakat sederhana” menunjuk pada masyarakat dengan karakter: (a) *small group*; (b) kekerabatan kuat; (c) nilai-nilai sangat dipegang kuat; (d) solidaritas kuat. Terminologi “masyarakat rasional” menunjuk pada masyarakat dengan karakter: (a) *larger group*; (b) berkembang corak individualis; (c) nilai-nilai mulai berkembang (bahkan bisa bertentangan); (d) solidaritas tumbuh karena kebutuhan.

Perkembangan masyarakat dunia mengalami percepatan ketika dunia masuk era globalisasi yang sangat berpengaruh secara cepat dengan perubahan-perubahan yang dirasakan, dilihat, dan dijalankan oleh manusia. Hal tersebut juga terjadi dalam masyarakat Indonesia. Tatahan sosial bangsa Indonesia berubah karena pengaruh eksternal. Nilai-nilai yang dipegang mulai berkembang, dari tatahan masyarakat paguyuban (sebagaimana tercermin dalam masyarakat Indonesia pra-1945) bergeser ke masyarakat patembayan (masyarakat modern Indonesia). Kenyataan ini pasti berpengaruh kepada pemaknaan dan implementasi ideologi Pancasila.

Memasuki Abad ke-21, kemajuan dunia mengalami akselerasi karena adanya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Bangsa Indonesia sebagai warga yang hidup dalam Taman Sari Dunia, juga menikmati dan dipengaruhi kemajuan-kemajuan pesat yang (mungkin) tidak terbayangkan pada tahun 1945 saat Soekarno memperkenalkan Pancasila kepada bangsa Indonesia. Corak hubungan-hubungan yang sangat rasional, individualis, tuntutan kebebasan berekspresi, kebebasan menentukan nasib diri sendiri, penghormatan hak asasi

manusia, kesetaraan gender, minimalisasi peran negara, tuntutan keterbukaan tatakelola pemerintahan, bisa jadi sesuatu yang pada masa lalu sulit untuk diwacanakan di ranah publik, tetapi pada masa sekarang justru menjadi tuntutan. Dalam pada itu demokrasi liberal sebagai implikasi globalisasi terbukti sampai hari ini tetap mendominasi diskursus dan praktik dalam penyelenggaraan pemerintahan di berbagai negara, dan karenanya dipandang sebagai yang paling benar.

Dari penelitian pakar-pakar terkemuka di bidang ilmu politik dan sosiologi, disimpulkan bahwa keberhasilan demokrasi liberal karena secara konsisten ia ditopang oleh pilar-pilar utama yaitu: negara demokratis yang berwibawa dan stabil serta *legitimate*, penyelenggaraan ekonomi berbasis kapitalisme dan mekanisme pasar bebas, keberlakuan prinsip *rule of law* dalam penyelenggaraan pemerintahan, penghormatan hak asasi manusia. Pada saat ini ketika Pancasila semakin disosialisasikan ternyata semakin tinggi pula tanggapan masyarakat eksistensi Pancasila di era sekarang. Apabila dianalisis, respons itu didasarkan pada perspektif dalam dimensi ruang dan waktu sekarang.

Oleh karena dimensi ruang dan waktunya sudah sangat berubah, maka perlu dijawab permasalahan-permasalahan sebagai berikut; (1) bagaimana pengaruh pergeseran tatanan sosial terhadap pemaknaan Pancasila; (2) bagaimana pengaruh dominasi demokrasi liberal terhadap tatanan sosial terutama di Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan itu perlu dijawab agar Pancasila tetap dapat diartikulasikan namun relevan dengan perkembangan tatanan sosial. Nilai-nilai gotong-royong, kebangsaan, keadilan sosial, musyawarah tentu harus direaktualisasi, dimaknai dalam konteks kekinian bahkan tidak menutup kemungkinan untuk dikompromikan dalam situasi-situasi kritis yang menyulitkan pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. Pembahasan

1. Pancasila Dalam Perubahan Tatahan Sosial;

Perubahan adalah proses yang abadi. Aristoteles mengatakan, di dunia tidak ada yang lebih abadi selain perubahan itu sendiri. Perubahan tatanan sosial selalu terjadinya dalam lingkup dunia maupun nasional. Keduanya tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, tetapi saling mempengaruhi. Perubahan tatanan dalam lingkup dunia dapat menjadi pemicu perubahan tatanan sosial di tingkat nasional dan juga sebaliknya. Tatahan sosial dalam tulisan ini menunjuk pada pengertian sistem kehidupan kemasyarakatan yang dilandaskan pada sistem regulasi dan tatanan sosial yang disepakati sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Setiap tatanan sosial selalu terikat oleh dimensi ruang dan waktu, dan setiap ide atau gagasan besar bisa lahir dari suatu tatanan sosial dalam ruang dan waktu tersebut. Pancasila lahir pada tatanan sosial Indonesia era prakemerdekaan, dalam situasi kehidupan bangsa yang terjajah, saat masih berlangsung Perang Dunia Kedua (1939-1945).

Kalau dilihat dari dimensi ruang dan waktunya, saat Pancasila diperkenalkan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, adalah saat dimana belum ada diskursus pengarus-utamaan hak asasi manusia, otonomi daerah, kebebasan berekspresi, penghargaan kearifan-kearifan lokal dan aspek lain yang menyentuh persoalan hak asasi manusia. Obsesi utama saat itu (tahun 1945) dan tahun-tahun berikutnya hingga awal 1970 adalah persatuan bangsa yang terus-menerus harus dikonsolidasikan mengingat adanya berbagai gangguan pemberontakan dan separatisme di Indonesia yang masih muda usianya. Artinya semangat mengedepankan persatuan bangsa dengan negara sebagai pemeran utamanya tentu sangat kuat, dan diskursus tentang hak asasi manusia

dengan segala implikasinya belum menjadi utama.

Pada era pemerintahan Orde Baru (1967-1997) semangat untuk tetap mengarus-utamakan Pancasila masih tetap ada, sekalipun ditanggapi oleh kepentingan politik untuk menghilangkan ingatan publik tentang peran Soekarno dalam kelahiran Pancasila maupun peran pemerintahan Indonesia pada periode-periode 1950 hingga 1960-an awal, yang sebenarnya telah melahirkan gagasan-gagasan besar tentang pembangunan nasional berdasarkan Pancasila. Melalui pelaksanaan penataran-penataran P4 yang dilakukan secara masif, pemerintahan Orde Baru berupaya mengarus-utamakan Pancasila, dengan penekanan perannya dalam kehidupan bermasyarakat, dan berbangsa. Upaya memberikan ingatan kepada publik tentang kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa menjadi sangat dominan, dan kemudian dijabarkan sekedar dalam butir-butir penuntun tingkah laku warga dalam hubungannya dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemahaman bahwa kepentingan negara maupun kepentingan umum harus lebih didahulukan daripada kepentingan diri sendiri (individu) sangat ditanamkan kepada warga. Pemahaman-pemahaman seperti itu dibangun demi kelancaran kepentingan-kepentingan pembangunan proyek-proyek pemerintah, tetapi sering dijumpai dalam pelaksanaannya terdapat indikasi kolusi-korupsi dan nepotisme. Akan tetapi pengaruh peristiwa globalisasi yang mulai terjadi pada tahun 1989-1990 menimbulkan kesadaran-kesadaran baru masyarakat Indonesia tentang hak asasi manusia, hakikat demokrasi, tuntutan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi-korupsi dan nepotisme, dan pasar bebas (Daniel Woodley, 2015). Kesadaran-kesadaran baru itu lambat laun menjadi pemicu bagi sebagian besar warga Indonesia yang mulai mempertanyakan manfaat penataran-penataran P4 (Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila).

Masyarakat mulai memandang, diskursus kepancasilaan dalam penataran-penataran seperti itu malah seperti membicarakan Pancasila di ruang kosong. Seperti hanya pengandaian-pengandaian ideal yang baik sekali disampaikan, tetapi masyarakat melihat tidak ada dalam pelaksanaannya. Kesadaran-kesadaran baru warga bangsa Indonesia, sebagai implikasi globalisasi langsung ataupun tidak langsung berpengaruh pada terjadinya proses-proses Reformasi pada tahun 1997-1998, sebuah proses ketatanegaraan yang akhirnya mengakhiri pemerintahan Presiden Soeharto (1968-1998). Semangat Reformasi kemudian menjadi pendorong dihapuskannya penataran-penataran P4 yang secara yuridis disahkan melalui, Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa).

Apabila direnungkan dalam perspektif sekarang, peristiwa Reformasi 1997-1998 di Indonesia itu hampir senada dengan peristiwa yang disebut *Arab Spring* yang “menimpa” negara-negara Arab. *The Arab Spring* merupakan gelombang revolusi yang diwujudkan dalam gerakan protes yang terjadi di negara-negara Arab di sekitar tahun 2011-2012, dengan dalih untuk membangun demokrasi. Fenomena *Arab Spring* (Abdul Kadir, 2017) ini bagaikan pandemi yang bersumber di suatu negara, lalu menyebar ke negara lain, sehingga beberapa negara Arab masyarakatnya ikut melakukan pemberontakan dengan dalih tuntutan demokrasi. Akan tetapi, sesudah *Arab Spring* berlalu, ada permasalahan yang sangat tragis, yaitu adanya keadaan yang oleh Francis Fukuyama disebut *a lack of basic institutions*, atau ketiadaan pemerintahan yang efektif. Akibatnya, di beberapa negara Arab timbul situasi *chaos* karena tidak ada jaminan keamanan dan perlindungan bagi penduduk karena ketiadaan negara sebagai institusi yang mempunyai monopoli kekuasaan sah atas

rakyatnya (Francis Fukuyama, 2014). Fenomena *Arab Spring* pada tahun 2010-2011 dapat menjadi contoh untuk menjelaskan proses-proses yang akhirnya melemahkan negara bangsa. Rakyat dan atau warga bangsa terlena dalam arus *euphoria* kebebasan, pengarus-utamaan hak asasi manusia dan demokrasi. Pengalaman masa silam tentang penanaman Pancasila melalui penataran P4, yang substansinya diberikan secara mengulang-ulang (repetisi) tetapi tidak ada refleksi lebih mendalam dan kontekstual - yang bersinergi dengan *euphoria* kebebasan pasca Reformasi - membuat generasi muda bangsa Indonesia lebih terpicat oleh filsafat dan falsafah dari negara-negara lain. Bukan hanya generasi muda, bahkan kalangan *elite* maupun pendidik pun mulai terpicat dengan falsafah dan filsafat dari luar yang sebenarnya belum teruji kesahihannya apabila diterapkan di Indonesia. Semangat berkebangsaan dalam arti yang sebenarnya mulai terkikis oleh varian kepentingan yang muncul akibat pengaruh-pengaruh dari luar. Muncul kemudian apa yang disebut politik identitas yang mengikis semangat berkebangsaan sebagaimana diajarkan para pendiri bangsa Indonesia. Walaupun tidak mendominasi hubungan-hubungan sosial kemasyarakatan, namun hubungan-hubungan sosial berbasis identitas diri dan atau kelompok berbasis agama, aliran keagamaan maupun pandangan politik, telah merebak dalam masyarakat. Solidaritas timbul karena kesamaan identitas, bukan karena semangat berkebangsaan Indonesia yang sebenarnya tidak dapat memungkiri realitas keberagaman di Indonesia.

Akan tetapi ketika peradaban dunia sangat didominasi oleh teknologi internet, terjadilah perubahan-perubahan yang sangat pesat bahkan mungkin tidak pernah dibayangkan oleh para perumus Pancasila dalam sidang-sidang BPUPK. Internet telah menjadi pemicu perubahan peradaban dunia yang diramalkan akan

bertahan dalam jangka waktu lama dan mengubah pola-pola kehidupan serta mendekonstruksi asumsi-asumsi dan ajaran-ajaran produk era empirisme (rasionalisme) yang telah mendominasi peradaban dunia sejak 1650 hingga saat ini. Ilmu pengetahuan alam, teknologi maupun humaniora yang ada saat ini adalah produk peradaban era empirisme (rasionalisme). Internet telah mengikis logika-logika ajaran era empirisme dengan logika-logika baru yang mungkin tidak terbayangkan di masa lalu. Era dominasi teknologi internet akan menjadi pemicu tumbuhnya peradaban baru dunia yang sangat mungkin akan bertahan lama, sebagaimana dulu era empirisme mengubah dunia dengan melahirkan ilmu pengetahuan dan humaniora berbasis rasionalitas-positivistik dengan mengandalkan bukti empiris, seperti yang dikembangkan dalam ilmu pengetahuan hingga saat ini.

Dengan berdasarkan pada ajaran Emile Durkheim (Anne, 2017) maka sesungguhnya telah terjadi perubahan tatanan masyarakat Indonesia dari masyarakat tradisional yang tergambar pada masyarakat Indonesia pra-kemerdekaan menuju “masyarakat rasional” yang menunjuk pada masyarakat Indonesia dengan karakter: (a) *larger group*; (b) berkembang corak individualis; (c) nilai-nilai mulai berkembang (bahkan bisa bertentangan); (d) solidaritas tumbuh karena kebutuhan. Kalau di era globalisasi dan Reformasi muncul tuntutan penghormatan hak asasi manusia yang kemudian melahirkan corak berpikir yang berorientasi pada keamanan dan kesejahteraan individu (*individual security and prosperity*) maka sekarang corak berpikir itu telah bergeser menuju kedaulatan individu (*individual sovereignty*). Kemajuan jagad komunikasi berkat internet adalah pemicu utama munculnya corak berpikir dan sikap yang merefleksikan kedaulatan individu. Manusia secara individu makin tidak mau diganggu kemerdekaannya untuk

menikmati hidup. Dunia telah memasuki tatanan dalam lingkup *metaverse*, sebuah komunitas virtual tanpa batas yang saling terhubung, dimana orang bisa bertemu, bekerja, belajar, bahkan mencari uang cukup dengan menggunakan aplikasi-aplikasi *smartphone* maupun perangkat-perangkat lain yang semakin efektif, efisien namun dengan hasil maksimal. Masyarakat akan semakin ber-mindset individual, walaupun ada semangat berkelompok, itu terjadi karena kesamaan kebutuhan yang terfragmentasi dengan bermacam-macam alasan misalnya kesamaan agama, kesamaan hobi, kesamaan profesi dan sejenisnya.

2. Demokrasi Liberal Dan Pergeseran Tatanan Sosial

Tantangan utama Pancasila di era kekinian adalah dominannya demokrasi liberal dalam percaturan politik-ekonomi dunia. Hasil penelitian pakar politik beraliran realis, Francis Fukuyama, menyimpulkan bahwa demokrasi liberal merupakan paham yang berhasil mengungguli paham-paham dan atau ideologi seperti: Marxisme, Facisme. Menurut Fukuyama dibanding dengan kedua ideologi besar itu, demokrasi liberal mampu bertahan hingga hari ini, karena di dalam demokrasi liberal tidak ditemukan adanya prinsip-prinsip yang secara inheren cacat atau kontradiktif (Fukuyama, 2014). “Keunggulan” demokrasi liberal karena itu perlu dipelajari, dipahami, dikritisi, untuk memperjuangkan penegakan demokrasi Pancasila sebagai paham demokrasi yang dirancang dan diwariskan para pendiri bangsa untuk keberlanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara garis besar di dalam buku yang berjudul: *The End of History and The Last Man* (1996) Francis Fukuyama mengatakan bahwa legitimasi demokrasi liberal - pada era pasca globalisasi - telah paripurna dalam arti telah mengatasi ideologi-ideologi sistem pemerintahan yang sebelumnya ada seperti: Fasisme ala Jerman sebelum Perang Dunia maupun, Komunisme yang ditandai dengan

bubarnya Uni Soviet pada tahun 1989. Seperti telah diuraikan dalam bab sebelumnya dalam pengertian umum, sejarah (*history*) dimaknai sebagai peristiwa-peristiwa yang telah terjadi didunia sebagai proses-proses sebab-akibat. Sejarah dalam konsepsi Francis Fukuyama adalah sesuatu yang bersifat holistik, koheren, dan evolusioner untuk mencapai pada satu puncak tertentu.

Karl Marx menyatakan, kapitalisme sebagai ibu demokrasi liberal akan runtuh karena kontradiksi internalnya (Sam Atkinson, 2013). Akan tetapi pendapat ini ternyata tidak terbukti. Justru yang terjadi, kapitalisme selalu mampu mengoreksi diri, dan memperbaiki metode-metodenya menjadi semakin sempurna, sebaliknya komunisme runtuh karena tidak mampu menjawab tantangan jaman. Kapitalisme telah mengubah diri dalam wajahnya yang lebih humanis, santun dan berpihak pada kaum lemah, miskin dan terpinggirkan. Dalam wajah yang humanis itu muncul proses-proses produktif yang menimbulkan pencerahan baru (*new enlightenment*), kesadaran baru yang diterima sesuatu yang tak terbantahkan. Dalam kata-kata Francis Fukuyama, “demokrasi liberal merupakan “titik akhir evolusi ideologi umat manusia” (“*end point of mankind’s ideological evolution*”) dan “bentuk akhir pemerintahan” (“*final form of human government*”) dan karena itu merupakan “akhir dari sejarah” (“*end of history*”). Fukuyama meramalkan tidak ada lagi pertentangan ideologi-ideologi besar dalam akhir sejarah. *The end of history* ini terjadi, karena ideologi-ideologi pemerintahan yang lain ternyata tidak mampu menjawab tantangan jaman, sebaliknya demokrasi liberal memang bebas dari kontradiksi-kontradiksi internal yang mendasar.

3. Transformasi Pemaknaan Nilai-Nilai Pancasila

Pancasila diperkenalkan Soekarno kepada bangsa Indonesia dalam sidang-sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Nilai-nilai yang melandasi prinsip-prinsip

itu yang kemudian dinamakan Pancasila oleh Soekarno, merupakan nilai-nilai yang bersumber dari pengalaman hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat baik dalam lingkup nasional maupun pengenalannya pada perkembangan dunia luar, seperti paham demokrasi, nomokrasi, republik, *welfare state*. Oleh karena itulah di dalam Pancasila kita mendapati adanya aspek religiusitas sekaligus aspek rasionalitas yang muaranya adalah mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Dalam kajian filsafat telah diajarkan bahwa yang disebut nilai selalu lahir dalam dimensi ruang dan waktu tertentu. Nilai merupakan hasil kontemplasi yang lahir dari tatanan sosial tertentu, sehingga dikatakan nilai-nilai lahir terikat oleh ruang dan waktu.

Apakah sebuah nilai mampu bertahan menembus ruang dan waktu dalam tatanan sosial yang sudah berubah, akan sangat tergantung dari seberapa jauh nilai-nilai itu mampu beradaptasi terhadap perubahan-perubahan itu, dan seberapa jauh nilai-nilai itu mampu menjadi landasan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan manusia dalam menghadapi kehidupan nyata untuk mewujudkan kehidupan yang tercukupi kebutuhan makanan, papan, pangan dan kebutuhan lain demi keberlanjutan hidup diri, keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Nilai-nilai dalam ideologi liberalisme mampu menembus jaman yang berubah karena mampu membuat penyesuaian-penyesuaian. Penganjur kapitalisme, George Soros menyatakan liberalisme harus menyadari bahwa nilai-nilai liberalisme tidak dapat hidup terisolasi. Sebagai partisipan pasar bebas, liberalisme tidak saja harus memenuhi kepentingan sendiri, tetapi juga harus peduli dengan masyarakat tempat hidup, dan ketika sampai pada keputusan kolektif, liberalisme harus mengedepankan kepentingan bersama (George Soros, 2002). Pemaksaan kepentingan sendiri (seperti dalam *laissez faire*) dalam mekanisme pasar akan menimbulkan instabilitas global. Intinya pemikiran

bercorak fundamentalisme pasar harus diubah, menjadi mekanisme pasar yang lebih bertanggungjawab secara sosial sebagai *habitus* baru.

Disisi lain pada kutub yang berlawanan, nilai-nilai dalam ideologi Marxisme-Komunisme juga tidak mampu menjawab tuntutan keadilan dan kesejahteraan masyarakat di negara-negara penganutnya. Contoh yang paling tragis adalah kegagalan nilai-nilai Marxisme-Komunisme menghadapi tantangan kemajuan dunia pasca-globalisasi pada tahun 1990. Uni Soviet bahkan tidak mampu bertahan eksistensinya sebagai negara sehingga harus membubarkan diri terpecah-pecah kembali menjadi satuan-satuan negara yang terdiri dari 15 negara. Akan tetapi, Rusia – China – Vietnam menjadi maju pesat seperti sekarang ini bukan karena dipegang teguhnya ideologi Marxisme-Komunisme. Keberhasilan mereka justru karena negara-negara itu melakukan transformasi konsepsi-konsepsi mendasar pada nilai-nilai yang terjabarkan dalam kebijakan ekonomi-politiknya (Ronald dan Ning Wang, 2012).

Belajar dari kegagalan Marxisme-Komunisme, kini Rusia dan China menjadi negara yang diperhitungkan dalam kekuatan militer dan pencatutan ekonomi internasional, artinya kemajuan yang pesat di kedua negara itu terjadi bukan karena dipegang-teguhnya nilai-nilai Marxisme-Komunisme, melainkan karena diadopsinya nilai-nilai baru dalam tata pemerintahan, politik dan ekonominya, yang diterapkan dengan sangat hati-hati. Semua dilakukan dalam rangka menciptakan negara yang mampu menyejahterakan rakyatnya.

Jepang adalah contoh berikut tentang negara yang mengadopsi nilai-nilai asing dengan sangat hati-hati tanpa meninggalkan nilai-nilai khas kebangsaannya. Di era global yang ditandai dengan dominannya pemikiran pasar bebas, peradaban Jepang itu tetap bertahan hidup berdampingan dengan ekspansi kapitalisme dalam segala lini.

Perjumpaan peradaban Jepang dengan peradaban Barat, setelah kekalahannya dalam Perang Dunia Kedua (1945), tidak mengakibatkan Jepang menjadi bangsa yang harus mengubah pola pikirnya menjadi kapitalistik. Kekhasan Jepang merupakan hasil perjuangan yang tak terputus sejak dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945. Ada pernyataan yang sangat anggun dari Kaisar Hirohito kepada bangsa saat penyerahan Jepang kepada Sekutu tanggal 15 Agustus 1945 (Elaine Hanson, 2010): “*Satukan seluruh kekuatan kalian, abdikan bagi pembangunan masa depan agar kalian sanggup memuliakan keagungan sejati Jepang yang mampu mengikuti derap kemajuan dunia*”. Pidato itu mencerminkan kepercayaan diri, karena kekuatan modal sosial yang sungguh luar biasa yang dimiliki bangsa Jepang. Era baru pun dimulai. Kaisar dibolehkan tetap bertakhta hanya dalam peran seremonial, sementara Jenderal Douglas MacArthur dari Amerika Serikat ditugaskan memimpin Jepang menuju transisi ke demokrasi. Namun penguasaan itu tidak membuat Jepang larut dalam budaya pikir peradaban Barat. Tidak tergoyahkannya peradaban Jepang, karena ternyata nilai-nilai dasar peradaban itu bersifat *genuine* yang berhasil dirajut jauh sebelumnya.

Jepang adalah bangsa yang memiliki struktur sosial hierarkis dan sekaligus solidaritas. Disebabkan oleh sifat yang demikian itu maka jejaring sosial (*social network*) di negara ini berwatak hierarkis dan sekaligus juga pekat dengan solidaritas. Berbeda dengan peradaban Barat, maka posisi seseorang di Jepang tidak terpisahkan secara individual, melainkan selalu erat terkait dan berada dalam kaitan dengan masyarakatnya. Konsep tentang seseorang tidaklah seorang diri melainkan “seorang-dalam-konteks-sosial”. Tetapi dengan kekhasan itulah Jepang justru *survive* menjadi negara industri modern yang diperhitungkan hingga hari ini. Modernitas Jepang tidak ditandai dengan penerapan peradaban

Barat dan peradaban lain yang tidak selaras dengan jati diri bangsa. Kejepangan-nya benar-benar terjaga, bahkan di dalam penyelenggaraan demokrasi. Berbeda dengan demokrasi produk peradaban Barat, demokrasi Jepang bernilai kolektif dan komunal. Gagasan-gagasan peradaban Barat tentang demokrasi, individualisme, pasar bebas, hak asasi manusia, sistem hukum modern tidak berpengaruh dalam peradaban Jepang dan di Tiongkok sekarang.

Di era global yang ditandai dengan dominannya pemikiran pasar bebas, peradaban Jepang itu tetap bertahan hidup berdampingan dengan ekspansi kapitalisme dalam segala lini. Perjumpaan peradaban Jepang dengan peradaban Barat, setelah kekalahannya dalam Perang Dunia Kedua, tidak mengakibatkan Jepang menjadi bangsa yang harus merubah pola pikirnya menjadi kapitalistik. Nyatanya industri dan dunia bisnis Jepang bisa maju pesat. Keunggulan Jepang bersama Tiongkok semakin menegaskan relevansi peradaban sebagai penopang keberhasilan ekonomi bangsa, bahkan menjadi kekuatan ekonomi baru yang mampu melawan tekanan negara-negara Barat.

Pembentukan peradaban Jepang memang bukan sesuatu yang alami, ia memerlukan kesediaan diri seseorang atau suatu komunitas untuk dijadikan satu rajutan berbasis keragaman budaya. Di dalam rajutan itu manusia bagaikan sekedat seutas benang di dalam peradaban. Tetapi apa pun yang dilakukan pada rajutan tersebut, seseorang atau suatu komunitas itu sebenarnya melakukannya untuk keberlanjutan mereka sendiri. Di dalam rajutan peradaban itu, segala sesuatunya terikat menjadi satu, tetapi saling berhubungan. Kekhasan nilai-nilai bangsa Jepang yang sudah dirajut lama sejak masa lalu jauh sebelum kalah pada Perang Dunia Kedua, ternyata sukses membawa Jepang seperti sekarang.

Sebenarnya sudah ada modal sosial bangsa Indonesia untuk mendefinisikan kembali keindonesiaannya, di era

sekarang. Modal sosial sebagai kekuatan yang sudah berurat berakar tersebut adalah: perasaan tidak terpisah dengan lingkungan sosial dan alam dimana bangsa itu hidup, menjunjung tinggi religiusitas, menjunjung tinggi kearifan lokal, musyawarah dan semangat komunalisme. Kekuatan tradisi hidup itu terbukti tidak tergoyahkan ketika Belanda menguasai Indonesia sejak 1696 hingga 1945. Bangsa Indonesia, telah menjadi titik perjumpaan budaya pikir lokal dengan budaya pikir pasar bebas yang sudah mengglobal. Masing-masing budaya pikir tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, bahkan bisa kontradiktif atau berlawanan. Tetapi masuknya Belanda di Indonesia dan mulai masuknya modernisasi ala Barat di Indonesia di era 1960-an, tidak menjadikan bangsa Indonesia kemudian meninggalkan corak budaya agraris, dan sebaliknya tidak begitu saja menerima cara berpikir pasar bebas sebagai kebenaran. Ini merupakan modal sosial yang kuat, untuk membuat kekuatan peradaban Indonesia, tetapi sayangnya malah mulai ditinggalkan dan ada masyarakatnya yang justru kagum dan berupaya membudayakan peradaban yang tidak selaras dengan keindonesiaan.

Dikutub yang sangat berlawanan, Samuel Huntington juga menjelaskan tentang fenomena yang disebutnya negara yang terkoyak (*torn country*), sebagai negara yang tidak pernah berhasil merajut budaya-budaya yang ada di masyarakat menjadi satu peradaban yang kokoh sebagai landasan negara kebangsaan (Samuel, 2006). Negara yang terkoyak terjadi karena masyarakatnya sendiri terdiferensiasi dalam keinginan-keinginan yang berbeda, sementara para pemimpin bangsanya mempunyai orientasi peradaban kebangsaan yang tidak pernah jelas atau setidak-tidaknya ikut-ikutan karena dominasi “peradaban universal” Barat. Huntington memberi contoh negara yang terkoyak yaitu Uni Soviet. Budaya sebagai bangsa Uni Soviet tidak pernah berhasil dirajut sebagai peradaban khas, sehingga negara itu akhirnya bubar pada tahun

1990. Konflik Rusia–Ukraina sekarang ini adalah bukti bahwa sejak disatukan dalam Uni Soviet pada 30 Desember 1922, tidak pernah tumbuh yang namanya jati diri bangsa Uni Soviet, walaupun secara budaya Rusia dan Ukraina adalah sesama bangsa Slavia yang mempunyai hubungan dekat berabad-abad. Hal senada juga terjadi pada Yugoslavia yang akhirnya harus bubar pada tahun 1990.

C. Simpulan

Perubahan sosial tatanan dunia yang bergerak dengan pesat telah mengubah aspirasi dan partisipasi warga dalam kehidupan. Pesatnya pergerakan dunia saat ini membuat suasana ketidakpastian. Bangsa Indonesia selayaknya menyadari dan terbuka terhadap ketidakpastian ini dan tidak melepaskan diri dari ketidakpastian, dengan bersikap fundamentalis. Harus disadari bahwa, ketidakpastian dunia seperti ini sebenarnya justru memberikan tantangan untuk maju, dan melakukan perbaikan pada sistem penyelenggaraan demokrasi Pancasila. Keberhasilan demokrasi liberal menembus ruang dan waktu seharusnya dapat menjadi pelajaran bagi kita tentang bagaimana seharusnya demokrasi Pancasila dikelola untuk mengantarkan kemajuan bangsa. Transformasi pemaknaan nilai-nilai Pancasila di era sekarang harus didasari bahwa kita tidak dapat hidup terisolasi terpisah dari hubungan negara lain. Kita tetap dapat menjadi partisipan dalam pasar bebas, namun harus peduli dengan penderitaan masyarakat dan ketika harus sampai pada keputusan bersama, kepentingan masyarakat bangsa harus dikedepankan. Kalau pembicaraan kita tentang nilai-nilai Pancasila masih mengandaikan seperti pada masyarakat di era 1945 di semua lini, maka pembicaraan tentang Pancasila tidak akan ada artinya. Ketika rakyat sudah banyak mendeosikan (membaktikan) diri pada ideologi, maka ideologi harus mampu menjawab persoalan-persoalan mendasar kehidupan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Atkinson, S. (2013). *The Politics Book*. London: Dorling Kindersley Ltd.
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). (2020). *Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila*. Jakarta: Kedeputan Pengkajian dan Materi BPIP.
- Basarah, A., & Hasanuddin, T.B. (Eds.). (2016). *Historisitas dan Spiritualitas Pancasila Refleksi Peringatan 67 Tahun Hari Lahir Pancasila*. Jakarta: Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan MPR-RI.
- Beeden, A., Zyl, M. van (2015). *The Sociology Book*. London: Dorling Kindersley Ltd.
- Cardenas, E.H. (2010). *How Governments Work The Inside Guide to the Politics of the World* (Alih bahasa oleh: Aswita Ratih Fitriani dkk.). Jakarta: PT Lentera Abadi.
- Coase, R., & Wang, N. (2012). *How China Became Capitalist*. Hampshire: Palgrave Macmillan.
- Fukuyama, F. (2014). *Political Order dan Political Decay, From the Industrial Revolution to The Globalization of Democracy*. New York: Farrar, Straus, and Giroux.
- Hatta, M., Soebardjo, A., Maramis, A. A., Sunario, Pringgodigdo, A.G. (1975). *Uraian Pancasila Dengan Dokumen Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945*. Jakarta: Penerbit Mutiara.
- Hosseini, S. A. (2010). *Globalization and Capitalism* [online]. DOI: 10.13140/RG.2.1.1883.0241 Available: <https://globalalternatives.wordpress.com/2010/3/27/globalization-and-capitalism/>
- Huntington, S. (1996). *The Clash of Civilization and the Remarking of Word Order*. New York: Simon and Schuster.
- Magee, B. (2016). *The Story of Philosophy*. London: Dorling Kindersley Ltd.
- Mushtaq, A.Q., & Afzal, M. (2017). Arab Spring: Its Causes and Consequences. *Journal of the Punjab University Historical Society*, 30 (January-June 2017), 1-10.
- Rooney, A. (2017). *How the World Works Philosophy From the Ancient Greeks to Great Thinkers of Modern Times*. London: Arcturus Publishing Ltd.
- Samekto, FX. Adji. (2022). *Menghadirkan Negara Hukum Berdasarkan Pancasila Di Era Pasca Globalisasi*. Semarang: Undip Press; Sekretariat Jenderal MPR-RI (2017).
- Sekretariat Jenderal MPR RI. (n.d.) *Bahan Tayang Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Soros, G. (2002). *The Crisis of Global Capitalism (Open Society Endangered)* Diterjemahkan oleh: Dindin Solahudin. Yogyakarta: Qalam.
- Totten, M.J. (2015). *Hanoi's Capitalist Revolution*. (Journal Online: <https://www.city-journal.org/html/hanoi-capitalistrevolution13743.html>).
- Weddyoningrat, R. (Pengantar), (1947). *Lahirnya Pantja Sila*. Yogyakarta: Oesaha Penerbitan Goentoer.
- Weeks, M. (2014). *Heads Up Philosophy*. London: Dorling Kindersley Ltd.
- Woodley, D. (2015). *Globalization and Capitalist Geopolitics Sovereignty and State Power in a Multipolar World*. London: Routledge.